



Keterbukaan Informasi Wujud Penghormatan Kepada Warga

● KID Gelar Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY

YOGYA, TRIBUN - Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud penghormatan pemerintah kepada warga.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat mewakili Gubernur DIY dalam Penghargaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 di Gedhong Pracimasana, Yogyakarta, Kamis (27/11).

KGPAA Paku Alam X mengingatkan bahwa budaya keterbukaan tumbuh dari kemauan, bukan perintah.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) kembali menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan sekaligus penghormatan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sri Paduka menekankan bahwa keterbukaan merupakan prinsip yang lebih luas dibandingkan sekadar transparansi.

"Reallitasnya, kita di pemerintahan sering menganggap transparansi saja sudah cukup. Padahal transparansi hanyalah bagian kecil dari keterbukaan. Transparansi mengizinkan pemerintah memilih informasi apa yang ingin disampaikan. Tetapi keterbukaan mengingatkan kita pada prinsip berbeda, bahwa informasi yang dihasilkan oleh badan publik bukan milik institusi, melainkan milik masyarakat yang dilayani," papar Sri Paduka.

Ia menegaskan bahwa akses informasi publik seharusnya mudah, cepat, dan bertanggung jawab, dan bahwa monev Keterbukaan Informasi Publik memberi ruang bagi pemerintah untuk melihat apa yang telah berjalan baik dan apa yang memerlukan perbaikan.

"Kita belajar memahami, bahwa pemerintahan yang terbuka bukan berarti pemerintahan yang sempurna, melainkan yang bersedia dan mampu menjelaskan alasan, proses, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya. Saya percaya, budaya keterbukaan tidak tumbuh dari perintah, tetapi dari kemauan," imbuh Sri Paduka.

Ia juga menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan dan mengingatkan bahwa



PENGHARGAAN - Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X didampingi Ketua KID DIY, Erniati menyerahkan piagam penghargaan kepada Kadis Kominfo DIY, HET Wahyu Nugroho dalam gelaran Penghargaan Informasi Badan Publik DIY.

penghargaan bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa standar keterbukaan terus bergerak.

"Kepada badan publik yang masih berproses, mari pahami bahwa komitmen dan upaya nyata untuk terus memperbaiki diri adalah yang utama," kata Sri Paduka.

Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Erniati, dalam laporannya, menyampaikan bahwa monev KIP 2025 berlangsung selama enam bulan sejak Juni hingga awal November, dengan peningkatan jumlah peserta yang signifikan.

"Peserta monev KIP tahun 2025 ini diikuti oleh 534 badan publik. Jumlah ini meningkat dari 419 badan publik di tahun 2024. Peningkatan jumlah peserta ini disebabkan jumlah kalurahan/kelurahan yang mengikuti monev bertambah menjadi 196 atau 50 persen dari total kalurahan/kelurahan yang ada di DIY," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa terdapat sembilan kategori penghargaan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, OPD DIY, OPD kabupaten/kota, kapanewon/kemantren, kalurahan/kelurahan, BUMD, instansi vertikal, instansi nonstruktural, serta lembaga yudikatif.

Dari hasil monev, sebanyak 63 badan publik meraih predikat informatif, 159 menuju informatif, 181 cukup informatif, 55 kurang informatif, dan 76 tidak informatif.

Dalam daftar peraih nilai tertinggi, Pemerintah Kota Yogyakarta menempati posisi utama untuk kategori pemerintah kabupaten/kota, Dinas Kesehatan DIY unggul pada kategori OPD DIY, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul meraih skor tertinggi pada kategori OPD kabupaten/kota.

Kemantren Wirobrajan menjadi yang terbaik pada kategori kapanewon/kemantren, Kalurahan Srimulyo meraih nilai tertinggi di kategori kalurahan/kelurahan, dan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) memimpin kategori BUMD.

Untuk kategori instansi vertikal, nilai tertinggi diraih BPS Kabupaten Bantul, sedangkan Bawaslu Kabupaten Sleman menjadi yang terbaik untuk instansi nonstruktural. Pada kategori lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Wates menempati peringkat tertinggi.

Selain itu, Komisi Informasi Daerah DIY juga memberikan penghargaan khusus untuk kategori Media Massa Cetak Mitra Keterbukaan Informasi Publik dan Radio Mitra Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk kedua kategori tersebut, penghargaan diberikan kepada Tribun Jogja sebagai mitra media massa cetak dan Sonora FM sebagai mitra radio dalam mendukung keterbukaan informasi publik di DIY. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005